



RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Implikasi Kebijakan Perkotaan Yang Berorientasi Pada Wilayah Kumuh Dan Miskin Di Kotamadya Surabaya.

Ketua Penelitian : Drs. Kris Nugroho
Anggota Penelitian : --

Fakultas/Puslit : Fisip Airlangga

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga 1990/1991
S.K. Rektor Nomer 9169/PT.03.H8/N/1990

Hunian liar/ bangunan liar merupakan persoalan akhir-akhir ini yang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia, tidak terkecuali kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Seiring dengan tingkat perkembangan pembangunan dan industrialisasi (modernisasi), maka seiring dengan itu berkembang pula masalah-masalah demografis sutau kota besar, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, lingkungan dan pemukiman serta kesejahteraan sosial ekonomi penduduk kota. Masalah-masalah tersebut sebetulnya menjadi bagian yang inheren dari sifat perkembangan suatu kota yang sedang melangkah ke arah industrialisasi.

Persoalan dia atas sebenarnya didasari oleh suatu asumsi bahwa dampak modernisasi kota akan menumbuhkan datangnya kelompok masyarakat ke kota untuk mencari penghidupan ekonomi dan sosial lebih baik. Apalagi jika wilayah itu kita artikan sebagai wilayah yang dari aspek ekonomi mengalami distorsi sumber-sumber ekonomi,

yang secara struktural memerosotkan kesejahteraan penduduknya. Akibat sosiologisnya adalah keadaan struktural ekonomi desa tersebut akan memacu dalam taraf tertentu penduduk desa untuk datang ke kota demi pengharapan akan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Inilah yang dinamakan dengan urbanisasi, yang menandai beban suatu kota akan pengharapan bagi orang-orang yang ingin merubah "nasib" ekonomi mereka.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan persoalan di atas yaitu menyangkut ketidak berdayaan kelompok "urbanisasi" dengan lingkungan sosial ekonomi dan kondisi pemukiman mereka, yang kalau diamati mereka membentuk suatu pemukiman tersendiri yang mewakili keterbatasan dan ketidak berdayaan ekonomi sosial mereka. Bentuk lingkungan sosial mereka pada dasarnya merefleksikan kehadiran kemiskinan, kekumuhan dan kecilnya pendapatan mereka dengan ditopang oleh kegiatan ekonomi subsistensi.

Hadirnya kemiskinan, kesenjangan dengan sektor formal yang dilindungi, lingkungan hunian yang kumuh, seringkali menjadikan kelompok miskin dan kumuh dianggap sebagai "pengganggu keindahan dan tertib sosial" kota. Karena itu cara penanganan yang diterapkan birokrasi untuk mengatasi kekumuhan dan kemiskinan mereka cenderung tehnokratis, yang menganggap mereka sebagai suatu masalah sosial dan penyakit perkotaan yang harus dihadapi secara birokratis pula tanpa menghadirkan refleksi kepentingan bawah masyarakat miskin tersebut. Dalam kasus penelitian ini, pemukiman kembali warga Sombo, kelurahan Simolawang, Kecamatan

Simokerto dari lingkungan yang semula kumuh dan miskin ke dalam rumah susun sewa, bisa dipandang sebagai suatu model teknokratisme birokrasi dalam penanganan lingkungan kumuh dan miskin. Cara penanganan demikian, bagaimana pun juga merupakan tanggung jawab birokrasi kota mengatasi salah satu indikasi kemiskinan, yaitu adanya pemburukan lingkungan hunian. Lepas dari masalah apakah tindakan demikian nantinya berhasil mengangkat kondisi ekonomi masyarakat setempat menjadi lebih baik atau malah tetap tidak berubah, adalah merupakan persoalan yang mendasar bagi inti dari kemiskinan yang multidimensi dalam cara penanganannya.

Dengan mendasarkan pada sejumlah kecil responden (30 orang) penelitian ini mengambil tempat di Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, tempat dibangunnya rumah susun sewa bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin yang semula hidup dalam lingkungan kumuh. Pembangunan rumah susun tersebut merupakan wujud dari kebijakan perkotaan yang berusaha menata kembali suatu lingkungan yang kumuh yang sebagian besar dihuni oleh pendatang dari pulau Madura, yang mana kehidupan ekonomi mereka ditopang oleh pola ekonomi informal dan subsistensi.

Kesimpulan dan Saran

1. Keberagaman pemukiman kumuh dan miskin di Surabaya didekati dengan beragam sudut, seperti yuridis, teknis dan kesehatan lingkungan. Tetapi, cara penanganan pemukiman kumuh dan miskin masih menonjolkan aspek teknisnya dibanding dengan penanganan

dari aspek sosialnya. Akibatnya pola kemiskinan masihlah menampakkan dirinya dalam wujud tidak adanya mobilitas ekonomi yang memadai yang mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

2. Walaupun mereka telah menghuni pemukiman baru yang secara tehnik sehat dan lebih baik, bukan berarti masalah budaya kemiskinan dan sikap terhadap kemiskinan akan dengan sendirinya bisa diatasi. Selama mereka masih belum mampu bersaing dan integrasi ke dalam ekonomi yang kompetitif serta kurangnya sumber-sumber ekonomi dan modal, pada dasarnya sulitlah akan bagi mereka untuk mengalami mobilitas ekonomi yang mendatangkan perbaikan penghidupan ekonomi mereka. Karena itu penanganan kemiskinan dan kekumuhan tersebut haruslah dilihat dalam kerangka mikro dan sporadis dalam mengatasi / mengurangi jumlah pemukiman kumuh di Surabaya. Agar cara penanganan kemiskinan dan kekumuhan tidak sekedar menyangkut masalah tehnik saja, sebaiknya pendekatan yang digunakan birokrasi kota bisa diarahkan pada aspek sosial, budaya dan pendekatan partisipatoris yang menyangkut kehidupan kalangan miskin perkotaan.
3. Berdasarkan pengamatan lapangan disarankan agar lebih banyak dilakukan penelitian-penelitian empiris mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kekumuhan. Masih belum jelas apakah masalah pemukiman kumuh merupakan masalah ekonomi dan fisik saja, ataukah masalah sosial dan kultural, karena itu

disarankan agar kebijakan perkotaan yang berorientasi pada penataan lingkungan kumuh dan miskin juga merupakan penanganan yang komprehensif yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya tehnisk dan lingkungan.

